

## PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM *OPEN DEFECATION FREE* (ODF)

Ali Syahputra<sup>1</sup>, Jamal Bake<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma,  
Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.

Email:

[Jamalbake@uho.ac.id](mailto:Jamalbake@uho.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator terhadap program *Open Defecation Free* (ODF). Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam proses penghitungan dan menganalisa hasil penelitian. Penelitian mengenai Peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat dalam Mewujudkan Program *Open Defecation Free* (ODF) tentunya dimulai dengan teori dan hipotesis sehingga penelitian menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator ketiganya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ODF. Serta peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator secara simultan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ODF.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Program *Open Defecation Free*.

### Latar Belakang Masalah

Lingkungan bersih merupakan awal kehidupan sehat yang menjadi kebutuhan pokok utama bagi manusia, upaya dalam mewujudkan lingkungan sehat yakni dengan melaksanakan sanitasi total yang berbasis masyarakat, sanitasi merupakan Langkah yang dibuat melalui penyediaan aksesibilitas air bersih dan sarana pembuangan limbah dan jamban bagi keluarga. Seperti diketahui pola idup masyarakat merupakan penyebab utama pencemaran salah satunya ialah perilaku buang air besar sembarangan (BABS/*Open Defecation*). Perilaku BABS merupakan perilaku hidup tidak sehat dimana perilaku ini merupakan Tindakan membuang tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau are terbuka yang kemudia mengkontaminasi lingkungan. Sebagai respon dari fenomena masyarakat yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tak hanya sebatas itu pemerintah pusat juga memasukkan Universal Akses Sanitasi 2019 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi fenomena BABS, menurut (Ahmadi & Saputra, 2021) peringkat atau rangking capaian program STBM di Indonesia masih sangat rendah. Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung merupakan salah satu kabupaten yang ikut berpartisipasi memberikan dukungan terhadap STBM.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan STBM diawali dengan pelaksanaan Pilar I dari STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau yang dikenal dengan istilah *Open Defecation Free* (ODF) yang dibuktikan dengan

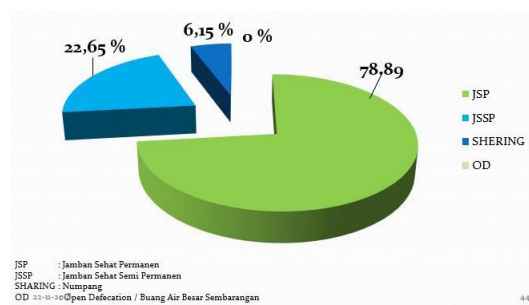
dikeluarkannya surat edaran dari Bupati Pringsewu Nomor: 503/165.C/LT.02/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Percepatan Pencapaian Pekon/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*)/ Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Tahun berikutnya, untuk menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program ini Bupati Pringsewu mengeluarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pringsewu. Selain itu dibentuk pula Satuan Tugas Pelaksanaan Gebrak *Open Defecation Free*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/443/KPTS/D.02/2017. Melalui regulasi ini pemerintah mengharapkan dapat memutus rantai penularan dan keracunan, kemudian dilakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi. sosialisasi dan menggerakkan masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi jamban sehat agar segera membangun Jamban Sehat yang dikelola oleh aparat desa dan kader kesehatan lingkungan. Adapun capaian dan target kedepannya sebagai berikut:

**Tabel 1 Capaian dan Target Sanitasi Lingkungan Masyarakat**

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (MDGs)	59,01%	60,36%	62,41%	100%
rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak berkelanjutan (MGDs)	57,02 %	67%	68,87%	100%

sumber: Data diolah 2022

Progress Akses Sanitasi Kabupaten Pringsewu Perbulan Desember Tahun 2022:



Gambar 1 Progress Akses Sanitasi Kabupaten Pringsewu Perbulan Oktober Tahun 2018  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program Sanitasi di Kabupaten Pringsewu masih mengalami beberapa kendala. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dari pemerintah untuk menanamkan budaya yang baru dan memberikan edukasi kepada masyarakat. peran pemerintah terutama di tingkat kelurahan khususnya Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu terdiri dari 2.996 Kepala Keluarga. Berdasarkan observasi pada kelurahan Pringsewu Barat masih ditemukan masyarakat yang melakukan

*sharing closet*, dan masih ditemukan jamban liar pada empang yang dimiliki masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat kemudian beberapa jamban milik masyarakat juga masih tergolong ke dalam jamban semi permanen hal ini tentunya belum memenuhi standar jamban sehat permanen yang mendukung Program ODF di Kabupaten Pringsewu. (Hasibuan et al, 2022) factor utama penyakit menular seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus adalah kurangnya akses sanitasi yang layak dilingkungan permukiman. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dalam mewujudkan ODF di Kelurahan Pringsewu Barat, peran pemerintah dalam pelaksanaan program *Open Defecation Free (ODF)* berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator (Labolo, 2016). Menurut (Abidin et al., 2021) peningkatan prilaku hygiene dan akses sanitasi merupakan upaya pemerintah yang harus ditingkatkan.

Sebagai regulator pemerintah memiliki peran dalam memberi acuan dasar untuk mengatur kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian sebagai dinamisator pemerintah menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta sebagai fasilitator pemerintah menciptakan suasana kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah Untuk diketahui, program ODF ini merupakan program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan tidak ada subsidi dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu sangat perlu peran pemerintah daerah khususnya Pemerintah di Kelurahan Pringsewu Barat dalam memberdayakan masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan/ODF. (Sinum, 2021) dengan adanya program ODF diharapkan dapat meningkatkan lingkungan masyarakat yang lebih bersih dan higienis. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian secara mendalam dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat dalam Mewujudkan Program Open Defecation Free (ODF). Dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator terhadap Program Open Defecation Free (ODF) secara parsial maupun simultan.

### **Tinjauan Pustaka**

Pemerintah merupakan organisasai yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu komunitas dalam suatu wilayah tertentu, pemerintah merupakan seseorang atau organisasi yang berwenang dalam pengambilan keputusan dalam suatu lingkup wilayah tertentu (Barusman, 2018). Pemerintah Republik Indonesia menghormati setiap daerah dan untuk mendukung setiap daerah sehingga pembangunan merata berjalan dengan lebih optimal (Mutiarra et al., 2020). (Tjandra, 2015) pemerintah (*government*) berdasarkan pengertiannya merupakan seseorang yang secara administratif memiliki wewenang atas kegiatan masyarakat dalam suatu negara, kota dan lain sebagainya.

Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat dalam mewujudkan Program ODF yang berdasarkan teori Peran Pemerintah menurut (Labolo, 2016) dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat terdiri dari pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator. Dalam peaksanaan sanitasi masyarakat pemerintah merupakan penggerak utama sehingga masyarakat mau untuk ikut berpartisipasi dan menciptakan kegiatan yang selaras. Menurut (Redaputri & Barusman, 2017) pembangunan daerah dapat dicapai dengan adanya strategi terutama dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Menurut (Muchsin & Saliro, 2020) pemerintah memiliki peranan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sanitasi lingkungan.

Pelaksanaan pilar pertama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM berupa Program ODF atau *Open Defecation Free/ Stop Buang Air Besar Sembarangan* yang ada di wilayah kabupaten Pringsewu tepatnya Pringsewu barat menjadi fokus utama dalam penelitian ini. *Open Defecation Free* atau ODF merupakan kondisi masyarakat yang

melakukan sanitasi total dengan tidak buang air besar sembaranga atau BABS (Arfiah et al., 2021). Program yang dibuat sebagai upaya perbaikan lingkungan yakni melalui program *Open Defecation free* yang merupakan bagian dari program Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deduktif, Penelitian Kauntitatif merupakan metode ilmiah sistematis yang digunakan untuk meneliti fenomena terhadap bagian-bagian atau menentukan hubungan dengan tujuan mengembangkan model-model matematis, teori, atau hipotesis berkaitan dengan fenomena. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah di Kelurahan Pringsewu Barat dalam mewujudkan Program *Open Defecation Free* (ODF) dimulai denngan teori dan hipotesis sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Dengan opsional variable penelitian sebagai berikut

Table 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Peran Pemerintah menurut (labolo, 2016)	Pemerintah Sebagai Regulator (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya Peraturan Daerah Tentang ODF</li> <li>b) Ada Keharusan Bagi masyarakat setelah terbitnya aturan</li> <li>c) Adanya Tindakan dari pemerintah bagi masyarakat yang tidak taat aturan</li> </ul>	ordinal
		Pemerintah Sebagai administrator (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemerintah ikut serta dan turun langsung kelapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program ODF</li> <li>b) Pemeritnah telah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai program ODF</li> <li>c) Ada pelatihan untuk kelompok masyarakat mendukung ODF (seperti pembuatan dan pembangunan jamban, Dll)</li> </ul>	Ordinal
		Pemerintah Sebagai Fasilitator (X3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemerintah memfasilitasi kelompok masayarakat untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung ODF (pembuatan Sekretariat, pembentukan organisasi, Dll)</li> <li>b) Pemerintah melibatkan sektor Swasta atau LSM untuk mensponsori program ODF</li> </ul>	ordinal
2	Open Defecation Free (ODF)	Program <i>Open Defecation Free</i> (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Semua anggota masyarakat telah menggunakan jamban sehat sebagai sarana BAB dan membuang tinja/ kotoran bayi ke jamban sehat</li> <li>b) Tidak terlihat tinja manusia di sekitar lingkungan</li> <li>c) Ada mekanisme monitoring oleh masyarakat dalam rangka stop BABS (SBS)</li> </ul>	ordinal

Sumber: data diolah, 2022

Populasi dari kelurahan Pringsewu Barat. Jumlah populasi yang ada di kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu sebanyak 2.996 Kepala Keluarga, namun berdasarkan hitungan sampel maka diambil sampel 97 orang kepala keluarga. Kelurahan Pringsewu Barat, dengan rancangan hipotesis sebagai berikut:

(Ho)  $\rho = 0$  :

- Tidak ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Tidak ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai dinamisator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Tidak ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai fasilitator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Tidak Ada pengaruh peran pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat Sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator terhadap program *Open Defecation Free* (ODF)

(Ha)  $\rho \neq 0$  :

- Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai dinamisator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai fasilitator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF)
- Ada pengaruh peran pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat Sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator terhadap program *Open Defecation Free* (ODF).

### Hasil dan Pembahasan

Kelurahan pringsewu barat merupakan wilayah kelurahan yang termasuk dalam kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu provinsi Lampung dengan jumlah populasi 2.996 kepala keluarga, dan total penduduk 10.728 jiwa. Untuk mengetahui Peran Pemerintah kelurahan Pringsewu Barat terhadap *Open Defecation Free* (ODF) dilakukan penelitian sebagai berikut.

#### a) Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas Peran Pemerintah

Tabel 1 Uji Validitas Pemerintah sebagai Regulator

		Correlations			
		x1.1	x1.2	x1.3	totX1
x1.1	Pearson Correlation	1	.514**	.290**	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000
	N	97	97	97	97
x1.2	Pearson Correlation	.514**	1	.331**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000
	N	97	97	97	97
x1.3	Pearson Correlation	.290**	.331**	1	.758**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001		.000
	N	97	97	97	97
totX1	Pearson Correlation	.734**	.795**	.758**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97

(Sumber : Aplikasi SPSS)

Tabel 2. Uji Validitas Pemerintah Sebagai Dinamisator

		Correlations			
		x2.1	x2.2	x2.3	totX2
x2.1	Pearson Correlation	1	.436**	.469**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	97	97	97	97
x2.2	Pearson Correlation	.436**	1	.489**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97
x2.3	Pearson Correlation	.469**	.489**	1	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	97	97	97	97
totX2	Pearson Correlation	.775**	.780**	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97

(Sumber: Aplikasi SPSS)

Table 3. Uji Validitas Pemerintah Sebagai Fasilitator

		Correlations		
		x3.1	x3.2	totX3
x3.1	Pearson Correlation	1	.460**	.830**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	97	97	97
x3.2	Pearson Correlation	.460**	1	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	97	97	97
totX3	Pearson Correlation	.830**	.877**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	97	97	97

Sumber: Aplikasi SPSS

Berdasarkan uji Validitas tersebut diketahui bahwa semua item memiliki nilai Signifikan < 0,05 dan semua item r hitung > dari r table maka semua item dalam Variabel Peran pemerintah baik sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator dan Pemerintah sebagai Fasilitator dinyatakan valid. Kemudian melalui uji Reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Uji reliabilitas

Cronbach's Alpha	N Of Item
0.627	3
0.717	3
0.625	2
0.892	8

Sumber: Aplikasi SPSS

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas diketahui berdasarkan Cronbach's alpha seluruh angket penelitian reliabel.

### b) Analisa Data Kuantitatif

Peran pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator berpengaruh signifikan terhadap *Open Defecation Free* (ODF). Melalui uji korelasi diketahui dari tabel berikut.

Tabel 5 Uji Koefisien Korelasi

		X1	X2	X3	Y
X1	Pearson Correlation	1	.664**	.486**	.571**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	97	97	97	97
X2	Pearson Correlation	.664**	1	.596**	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97
X3	Pearson Correlation	.486**	.596**	1	.620**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	97	97	97	97
Y	Pearson Correlation	.571**	.629**	.620**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97

(Sumber: Aplikasi SPSS)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui, Koefisien korelasi peran pemerintah sebagai regulator dengan ODF di kelurahan Pringsewu Barat sebesar 0,571 artinya hubungan antar kedua variabel dalam kategori cukup tinggi dan arah korelasi (+) berarti jika peran pemerintah sebagai regulator meningkat maka ODF akan meningkat begitu juga sebaliknya jika peran pemerintah sebagai regulator menurun maka ODF juga akan menurun, kemudian Koefisien korelasi peran pemerintah sebagai dinamisator dengan ODF di kelurahan Pringsewu Barat sebesar 0,629 artinya hubungan antar kedua variabel dalam kategori tinggi dan arah korelasi (+) berarti jika peran pemerintah sebagai dinamisator meningkat maka ODF akan meningkat begitu juga sebaliknya jika peran pemerintah sebagai dinamisator menurun maka ODF juga akan menurun. serta Koefisien korelasi peran pemerintah sebagai fasilitator dengan ODF di kelurahan Pringsewu Barat sebesar 0,620 artinya hubungan antar kedua variabel dalam kategori tinggi.

Kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda guna menguji hipotesis diterima atau ditolak melalui uji hipotesis yakni uji T Statistik, dengan hasil data sebagai berikut.

Tabel 6 Uji T Statistik Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.510	.384		1.330	.187
Peran Pemerintah Sebagai Regulator (X1)	.248	.111	.218	2.230	.028
Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator (X2)	.285	.110	.276	2.594	.011
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator (X3)	.316	.082	.349	3.835	.000

a. Dependent Variable: Open Defecation Free (Y)

(Sumber: Aplikasi SPSS)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa, t hitung variabel peran pemerintah sebagai regulator sebesar 2,230 dengan tingkat signifikan 0,028 dengan Tingkat Sig  $\leq 0,05$  maka Hipotesis diterima atau terdapat pengaruh pemerintah sebagai regulator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF), kemudian t hitung variabel peran pemerintah sebagai dinamisator sebesar 2,2594 dengan tingkat signifikan  $0,11 \leq 0,05$  maka Hipotesis kedua diterima atau terdapat pengaruh Peran Pemerintah sebagai dinamisator terhadap Program

*Open Defecation Free* (ODF), kemudian hitung variabel peran pemerintah sebagai fasilitator sebesar 3,385 dengan tingkat signifikan  $0,000 \leq 0,05$  maka hipotesis ketiga diterima atau peran pemerintah sebagai fasilitator berpengaruh terhadap ODF. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan melalui Uji anova atau uji F dengan data sebagai berikut.

Tabel 7 Uji F Statistik

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	17.938	3	5.979	32.862	.000 <sup>a</sup>
Residual	16.921	93	.182		
Total	34.859	96			

a. Predictors: (Constant), Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator (X3), Peran Pemerintah Sebagai Regulator (X1), Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator (X2)  
b. Dependent Variable: Open Defecation Free (Y)

(Sumber: Aplikasi SPSS)

Dari hasil Uji F diketahui bahwa F hitung memiliki nilai 32,862 dengan tingkat signifikansi  $0,000$  atau  $\leq 0,05$ . Maka peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator secara bersama-sama berpengaruh terhadap ODF. Atau Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator secara simultan terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF). Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut (Labolo, 2016) pemerintah menjalankan fungsinya dalam pembangunan melalui pemberdayaan, pengarahan, dan membentuk kemandirian masyarakat sehingga mampu menciptakan kemakmuran secara berkesinambungan. Sebagai regulator pemerintah kelurahan pringsewu barat membuat himbauan ke masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan, mewajibkan masyarakat untuk Stop BABS, serta mengambil tindakan jika ada warga yang tidak taat aturan. Peran pemerintah sebagai dinamisator pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan sosialisasi, serta memberikan dukungan berupa pelatihan yang berkaitan dengan ODF. sebagai fasilitator pemerintah kelurahan Pringsewu Barat memfasilitasi kelompok masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung ODF serta berupaya untuk mengajak sektor swasta atau LSM dalam mensponsori ODF.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yakni,

1. Secara parsial Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,571 dan arah korelasi (+).
2. Secara parsial Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai dinamisator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,629 dan arah korelasi (+)
3. Secara parsial Ada pengaruh peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai fasilitator terhadap Program *Open Defecation Free* (ODF) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,620 dan arah korelasi (+).
4. Secara simultan Terdapat Pengaruh h Peran Pemerintah Kelurahan Pringsewu Barat sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator berpengaruh signifikan terhadap program *Open Defecation Free* dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,717 dan arah korelasi (+).



## Daftar Pustaka

- Abidin, Arsiana., Tosepu, Ramadhan., Zainuddin, Asnia. 2021. Evaluasi Program Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Bombana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*. 12(4). 43-66
- Arfiah, A., Patmawati, P., & Afriani, A. (2021). Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 113-135.
- Barusman, M. Y. S. (2018). Decision making model of electric power fulfillment in lampung province using soft system methodology. In *Decision making model of electric power fulfillment in lampung province using soft system methodology: Barusman, M. Yusuf S.*
- Barusman, M. Yusuf S. 2017. *Soft Systems Methodology Solusi Untuk Kompleksitas Manajemen*. Lampung: UBL Press.
- foeh Foeh, C., Joko, T., & Darundiati, Y. H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 749-748.
- Hasibuan, N. H., Suryati, I., Khairani, F., & Dalimunthe, N. I. P. (2022). Optimization of Sanitation Facilities to Support Open Defecation Free (ODF) Programs in Dusun 13 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 407-418.
- Labolo, Muhadam. 2016. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Indonesia
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Open Defecation Free in Kartiasa Village in The Era Of Regional Autonomy: Implementation and Barriers. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(2), 121-134.
- Mutiara, Nisa, Barusman, Andala Rama Putra, Djoko, Mursinto, Zainuddin, Maliki, Erlane K, Ghani. 2020. *Model Development of Community Participation in Post Implementation of Village Development Act Number6/2014 in Megaluh Village, Jombang Regency, East Java Province*. *Engineering & Management*. 82(2), 9908 – 9917
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pringsewu
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2), 86-93.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, A., & Saputra, R. (2021). Status analysis open defecation free (ODF) of land availability and economic status in Sagulung district, Batam city. *Jurnal Kesehatan Ibnu Sina (J-KIS)*, 2(01), 1-7.

- Sinum, M. B. A. (2021). Hubungan Program Open Defecation Free (ODF) Oleh Pemerintah Dengan Kejadian Diare. *Jurnal Medika Hutama*, 2(03 April), 928-933.
- Tjandra, W. Riawan, dkk. 2010. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.